

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Sumberdaya Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia sangat besar. Namun, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara benar, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan informasi para pelaku kegiatan akan pentingnya memanfaatkan dan mengolah secara lestari dan berkesinambungan. Sumberdaya ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia juga memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia. Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan kekerangan termasuk rumput laut (Sipahelut, 2010).

Keragaman pemanfaatan yang ada di wilayah pesisir dan lautan telah menimbulkan konflik pengelolaan antara masyarakat nelayan yang satu dengan masyarakat yang lain dan terjadi benturan kepentingan antara masyarakat nelayan dengan instansi sektoral dan atau swasta maupun benturan kepentingan antar sektor. Dampak dari konflik pengelolaan tersebut telah mengakibatkan rusaknya lingkungan pesisir dan lautan, terpinggirnya akses masyarakat nelayan lokal dalam penelolan sumberdaya pesisir dan terjadi eksploitasi sumberdaya pesisir secara berlebihan (Syafa'at, *et al.* 2008).

2.2 Persepsi

Setiap individu mempunyai keterbatasan dalam menerima rangsangan atau informasi sesuai dengan kepribadian, minat, motivasi, dan sikap yang ada dalam individu tersebut. Rangsangan atau informasi yang diterima setiap individu akan menyebabkan perubahan pandangan, pendapat dan daya pikir terhadap suatu obyek tertentu yang disebut dengan persepsi. Persepsi adalah proses pengamatan seseorang terhadap suatu obyek atau stimulus yang diterima dari lingkungannya dan menggunakan inderanya masing-masing. Setiap orang akan menginterpretasikan apa yang diterima dan dilihat secara berbeda-beda. Artinya persepsi seseorang bersifat subyektif, karena seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu berdasarkan kemampuannya masing-masing (Jhon, 2002).

Persepsi pada dasarnya adalah proses yang dialami seseorang dalam memahami informasi tentang dunia atau lingkungan melalui penglihatan, penghayatan dan lain-lain. Persepsi setiap orang itu berbeda karena sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Bertambah tinggi pengetahuan dan pemahaman seseorang pada objek yang di persepsi maka baik pula bentuk persepsi orang tersebut terhadap objek. Persepsi juga merupakan suatu proses pemahaman terhadap apa yang terjadi dilingkungan orang yang sedang berpersepsi. Hubungan antara lingkungan dengan manusia dan tingkah lakunya adalah hubungan timbal balik saling terkait dan saling mempengaruhi (Mardijono, 2008).

2.3 Masyarakat Nelayan

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada akan mendapatkan hal baru. Adanya hal baru tersebut maka dapat diketahui bila kita melakukan suatu

perbandingan dengan suatu hal pada masa tertentu dengan suatu hal pada masa lampau. Hal baru bisa berupa sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah didapat, belum pernah dilihat dan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Ada masyarakat yang bisa menerima dan memahami hal-hal baru dengan cepat dan ada masyarakat yang lambat dalam memahami dan menerima hal baru tersebut. Semua masyarakat termasuk masyarakat nelayan akan menerima hal baru dalam lingkungannya apabila hal baru yang diberikan dapat dimengerti dan dapat dimanfaatkan serta membawa perubahan yang berdampak positif (Muflikhati, *et al.* 2010).

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di daerah pesisir. Masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya ini menjadi pembeda antara masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan yang ada. Untuk menjaga sumberdaya dan mengembangkan masyarakat nelayan maka perlu adanya sosialisasi dan campur tangan dari pemerintah secara berkesinambungan agar masyarakat bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa merusak dan masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik serta mempertahankan hak untuk mengakses sumberdaya pesisir dan lautan guna menjamin tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik (Sipahelut, 2010).

2.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Pontoh (2011), mengatakan bahwa sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh yang merasa tidak berdaya dihadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil. Keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nelayan yang miskin.

Masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagaimana masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan (Masri, 2010).

Masyarakat nelayan seperti juga masyarakat yang lain yang menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan

pelayanan publik, belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Muflikhati, *et al.* 2010).

2.5 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di baris penangkapan dan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam penunjang (Lubis, 2002).

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan (KEP.10/MEN, 2004).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.10/MEN, 2004 tentang Pelabuhan Perikanan, dijelaskan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perikanan pedalaman, perairan kepulauan, laut teretorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut :

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang – kurangnya 10 GT;
- c. Panjang dermaga sekurang – kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang – kurangnya minus 2 m.
- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.
- e. memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 5 Ha.

2.5.1 Peran Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan basis utama dalam kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Aktivitas unit penangkapan ikan di laut harus keberangkatannya dari pelabuhan dengan bahan bakar, makanan, es, dan lain-lain secukupnya. Informasi tentang data harga dan kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat dari pelabuhan ke kapal di laut. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal akan kembali dan masuk ke pelabuhan untuk membongkar dan menjual ikan hasil tangkapan (Lubis, 2002).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002), Pelabuhan Perikanan memiliki peranan sebagai berikut:

1. Peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktifitas produksi, antara lain:
 - a. Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.

- b. Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat, bahan bakar, perbaikan alat tangkap, ataupun kapal).
 - c. Tempat berabuh kapal perikanan.
2. Sebagai pusat distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi antara lain :
- a. Tempat transaksi jual beli ikan.
 - b. Sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan.
 - c. Sebagai terminal ikan hasil laut.
3. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas ini antara lain sebagai pusat :
- a. Kehidupan nelayan
 - b. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan
 - c. Lalu lintas jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar.

2.5.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi ganda, yakni disamping memberikan perlindungan bagi kapal-kapal yang berangkat maupun mendaratkan serta berlabuh, membongkar hasil tangkapan, pengolahan dan pemasaran, juga sebagai tempat istirahat paranelayan. Adanya prasarana atau pelabuhan perikanan tersebut memungkinkan seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat dikonsentrasikan dan sekaligus pula menjadi pintu gerbang yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan daerah-daerah pedalaman (hinterland), dalam arti arus lalu lintas, jaring-jaring aktivitas pemasaran dan lain-lain kegiatan dari dan ke daerah pedalaman ini berjalan dengan lancar (Fitriyah, 2007)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, dijelaskan bahwa fungsi pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan
2. Pelayanan bongkar muat
3. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
4. Pemasaran dan distribusi ikan
5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat perikanan
7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
8. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan
9. Pelaksanaan kesyahbandaran
10. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan
11. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan
12. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan
13. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan / atau
14. Pengendalian lingkungan

2.5.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), Pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pelabuhan perikanan, dimana fasilitas pelabuhan perikanan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu : fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan/penunjang.

a. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Fasilitas pelindung meliputi : pemecah gelombang (*break water*), penangkap pasir (*grond grains*), turap penahan tanah (*revetment*),serta *jetty*.
2. Fasilitas tambat meliputi : dermaga, tiang tambat (*bolder*), pelampung tambat, *bollard*, serta *bier*.
3. Fasilitas perairan, meliputi : alur dan kolam pelabuhan
4. Fasilitas transportasi, meliputi : jembatan, jalan kompleks, tempat parkir.
5. Lahan yang dicadangkan untuk kepentingan instansi pemerintah.

b. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri.

Adapun hal-hal yang masuk dalam kategori fasilitas fungsional yang dapat diusahakan yaitu :

1. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat perikanan terdiri dari bengkel, *slipway / dock* dan tempat penjemuran jaring.
2. Lahan untuk kawasan industri
3. Fasilitas pemasok air dan bahan bakar untuk kapal dan keperluan pengolahan Fasilitas pemasaran, penanganan hasil tangkapan,

pengawetan dan pengolahan, tempat pelelangan ikan, tempat penjualan hasil perikanan, gudang penyimpanan hasil olahan, pabrik es, sarana pembekuan, *cold storage*, peralatan *processing*, *derek/crane*, lapangan penumpukan.

Sedangkan fasilitas fungsional yang tidak dapat diusahakan meliputi :

1. Fasilitas navigasi : alat bantu navigasi, rambu-rambu dan suar
2. Fasilitas komunikasi : stasiun komunikasi serta peralatannya.

c. Fasilitas Tambahan Pelabuhan Perikanan

Fasilitas tambahan atau penunjang pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas tambahan tersebut terdiri dari :

1. Fasilitas kesejahteraan nelayan terdiri dari : tempat penginapan, kios bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, serta balai pertemuan nelayan.
2. Fasilitas pengelolaan pelabuhan terdiri dari : kantor, pos penjagaan, perumahan karyawan, mess operator.
3. Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal dan limbah industri. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

Didalam pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, Direktorat Jenderal Perikanan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan produksi
2. Pengembangan pangkalan pendaratan ikan dibuat berdasarkan kecepatan peningkatan produksi yang sudah ada pada saat ini dan prospek pengembangannya
3. Pengembangan kegiatan perikanan dibuat berdasarkan kecepatan peningkatan konsumsi ikan yang sudah tercapai saat ini.

Dalam pendekatan konsumsi ini, kegiatan yang harus diakomodasikan meliputi kegiatan produksi dari nelayan setempat dan perdagangan ke dan dari luar daerah melalui pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan tersebut. Pada pangkalan pendaratan ikan yang masih dikelola oleh nelayan setempat, sebagaimana pangkalan pendaratan ikan lainnya, pengembangannya sering mengalami hambatan, baik faktor *intern* maupun faktor *ekstern*. Beberapa faktor penghambat *intern* antara lain:

1. sehingga kemampuan untuk berkembangurang memungkinkan
2. *Skill* yang rendah, baik *technical skill* maupun *managerial skill*, sehingga tidak efisien dalam usahanya, rendah produktifitasnya serta lemah dalam manajemen usaha
3. Tingkat penguasaan teknologi yang rendah, sehingga ketergantungan terhadap alam sangat tinggi.

Sedangkan faktor penghambat *ekstern* antara lain :

1. Prasarana yang kurang menunjang, seperti jalan penghubungke/dari pusat-pusat perekonomian kurang memadai
2. Sarana produksi yang berupa bahan/alat penangkapan, es, garam dan sebagainya masih terbatas
3. Oleh karena tidak ditunjang oleh fasilitas yang cukup, ikan hasil tangkapan kualitasnya cepat turun, sehingga harganya/nilai ikan menjadi murah
4. Jaringan pemasaran hasil masih berliku-liku atau bersifat *unorganized market*, sehingga tidak menguntungkan nelayan. Secara geografis pusat produksi perikanan jauh dari pusat konsumen.

Lembaga perkreditan yang bisa membantu permodalan usaha belum banyak terdapat di daerah nelayan dan sistem kredit yang ada belum efektif dalam menunjang usaha perikanan rakyat sesuai dengan situasi dan kondisi. Kondisi

alam yang tidak menunjang pengembangan sarana dan prasarana, terutama yang terkait dengan ketersediaan lahan darat.

2.6 Skala Likert

Menurut Sugiyono (2006) dalam Mardijono (2008) Skala likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner atau suatu responden untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan yang berkaitan dengan suatu hubungan timbal balik atau saling terkait dan saling mempengaruhi. dan skala likert juga digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala liket, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang adapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert diberi skor dengan garansi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata dan skor antara lain:

- Skor 5. Sangat (setuju/Baik/Suka)
- Skor 4. (Setuju/Baik/suka)
- Skor 3. Netral / Cukup
- Skor 2. Tidak (setuju/baik/) atau kurang
- Skor 1. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali)

Instrumen dari penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda Setelah pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab maka langkah selanjutnya adalah penjumlahan skor berdasarkan penggolongan tertentu. Setelah mengetahui jawaban responden maka

selanjutnya adalah menganalisis data interval yang ada dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dengan rumus: $T \times P_n$

T = Total Jumlah Responden yang memilih

P_n = Pilihan Angka Skor Likert

Setelah itu mencari jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dengan rumus: **Skor Tertinggi Likert x Jumlah Respdnen** (seandainya semua menjawab sangat setuju) dan yang terakhir adalah menetapkan tingkat persetujuan responden dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Total Skor}}{\text{Jumlah Skor Ideal}} \times 100\%$$

Data responden akan didistribusikan berdasarkan kriteria tertentu sehingga bisa mengetahui respon terbanyak sebagai posisi responden (Sugiyono, 2013).

2.7 Analisis Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. Data yang dikumpulkan tersebut perlu disajikan supaya mudah dimengerti, menarik, komunikatif, dan informatif bagi pihak lain. Beberapa teknik yang akan dibahas disini meliputi ukuran gejala pusat, ukuran keragaman, penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. Bentuk-bentuk penyajian data tersebut secara umum dibagi dalam dua aspek, yaitu (1) penyiapan data yang mencakup proses editing, pengkodean, dan pemasukkan data, serta (2) analisis pendahuluan meliputi pemilahan, pemeriksaan, dan penyusunan data sehingga diperoleh gambaran, pola, dan hubungan yang lebih bermakna (Sugiyono, 2013).